

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Laporan keuangan yang dihasilkan akan digunakan oleh beberapa pihak yang berkepentingan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Oleh karena itu, informasi yang terdapat di dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) harus bermanfaat dan sesuai dengan kebutuhan para pemakai. Sehubungan dengan hal tersebut laporan keuangan yang berkualitas merupakan isu penting sebagai pertanggungjawaban pihak pemerintah terhadap rakyatnya. Sehingga menjadi alasan bagi peneliti untuk meneliti lebih lanjut tentang kualitas laporan keuangan.

Fenomena pelaporan keuangan pemerintah di Indonesia merupakan sesuatu hal yang menarik untuk dikaji lebih lanjut. Dari berbagai tulisan yang berhasil di-*download* dari internet, ternyata di dalam laporan keuangan pemerintah masih banyak disajikan data-data yang tidak sesuai. Selain itu juga masih banyak penyimpangan-penyimpangan yang berhasil ditemukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dalam pelaksanaan audit laporan keuangan pemerintah. Seperti tulisan yang berhasil dihimpun adalah sebagai berikut: Ketua Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Anwar Nasution menilai laporan keuangan Pemerintah Daerah banyak yang bermasalah bahkan tidak layak audit. Anwar Nasution menyebutkan, permasalahan yang ditemukan diantaranya terkait ketidakjelasan penyimpanan dana daerah dan penggunaan keuangan daerah dengan boros yang tidak jelas keperluannya. Anwar Nasution juga mengkritik akuntabilitas transparansi laporan keuangan Pemda masih sangat rendah (indosiar.com, 10 Januari 2007).

Masih banyaknya fenomena laporan keuangan pemerintah yang belum menyajikan data-data yang sesuai dengan peraturan dan masih banyak penyimpangan-penyimpangan yang berhasil ditemukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam pelaksanaan audit laporan keuangan pemerintah membuat tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good*

governance government) meningkat. Hal itu juga yang telah mendorong pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menerapkan akuntabilitas publik.

Laporan keuangan sektor publik yang ideal adalah yang dapat memenuhi syarat kualitatif Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, yakni: relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami.

Dalam pengelolaan keuangan, pemerintah melakukan reformasi dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara disebutkan bahwa Gubernur/Bupati/Wali Kota menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang mensyaratkan bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disusun dan disajikan dengan standar akuntansi pemerintahan yang ditetapkan oleh peraturan pemerintah. Pemerintah juga mengeluarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang No. 33 tahun 2004 yang merubah akuntabilitas atau pertanggungjawaban pemerintah daerah dari pertanggungjawaban vertikal (kepada pemerintah pusat) ke pertanggungjawaban horizontal (kepada masyarakat melalui DPRD).

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) setiap tahunnya mendapat penilaian berupa Opini dari Badan Pengawas Keuangan (BPK). Ketika BPK memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), artinya dapat dikatakan bahwa laporan keuangan suatu entitas pemerintah daerah tersebut disajikan dan diungkapkan secara wajar dan berkualitas. Terdapat empat opini yang diberikan pemeriksa yaitu : Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Opini Tidak Wajar (TP), dan Pernyataan Menolak memberi Opini atau Tidak Memberi Pendapat (TMP).

Berbicara mengenai pelaporan keuangan dan nilai informasi yang terkandung dalam laporan keuangan pemerintah akan menimbulkan pertanyaan apakah pelaporan keuangan pemerintah selama ini sudah memenuhi kriteria kompetensi informasi yang disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan? Apakah laporan keuangan pokok yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan (UU No 17 Tahun 2003) telah relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami?

Organisasi sektor publik di Indonesia dalam praktiknya kini diwarnai dengan munculnya fenomena menguatnya tuntutan akuntabilitas atas organisasi-organisasi publik tersebut, baik di pusat maupun daerah. Akuntabilitas merupakan bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik (Mardiasmo, 2009).

Pemerintah adalah entitas pelapor (reporting entity) yang harus membuat laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawabannya karena : (a) pemerintah menguasai dan mengendalikan sumber-sumber yang signifikan; (b) penggunaan sumber-sumber tersebut oleh pemerintah dapat berdampak luas terhadap kesejahteraan dan ekonomi rakyat; dan (c) terdapat pemisahan antara manajemen dan kepemilikan sumber-sumber tersebut (Partono, 2000).

Sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintahan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah adalah dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Laporan keuangan pemerintah yang dihasilkan harus

memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005. Laporan keuangan pemerintah kemudian disampaikan kepada DPR/DPRD dan masyarakat umum setelah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Adapun komponen laporan keuangan yang disampaikan tersebut meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Fenomena yang terjadi di Lampung terkait dengan hasil audit BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 1.1
Opini BPK atas LKPD Provinsi Lampung

No.	Pemda	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	Provinsi Lampung	WDP	WTP DPP	WTP	WDP	WTP DPP	WTP	WTP
2	Kab. Lampung Barat	WTP	WTP DPP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
3	Kab. Lampung Selatan	WTP	WTP DPP	WDP	WDP	WDP	WDP	WTP
4	Kab. Lampung	WDP	WDP	WTP	WDP	WDP	WDP	WTP
5	Kab. Lampung Timur	TMP	TMP	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP
6	Kab. Lampung Utara	TMP	WDP	TW	TW	WDP	WTP	WTP
7	Kab. Mesuji	WDP	TMP	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP
8	Kab. Pesawaran	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP	WTP
9	Kab. Pesisir Barat	-	-	-	-	TMP	TMP	WDP
10	Kab. Pringsewu	TMP	WDP	TMP	WDP	WDP	WTP	WTP
11	Kab. Tanggamus	WDP	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP	WDP
12	Kab. Tulang Bawang	WDP	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP
13	Kab. Tulang Bawang Barat	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
14	Kab. Way Kanan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
15	Kota Bandar Lampung	WTP	WTP DPP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
16	Kota Metro	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Sumber: BPK, IHP Semester 1 Tahun 2017

Dilihat dari tabel 1.1 di atas, opini yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan terhadap laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Pringsewu dari tahun anggaran 2010 hingga 2011, tidak memperoleh opini wajar tanpa pengecualian (WTP) bahkan sempat memperoleh opini terendah yaitu tidak memberikan pendapat (TMP), yang berarti adanya kualitas laporan keuangan yang belum memenuhi standar ideal.

Penulis mengambil pemilihan lokasi penelitian pada pemerintah daerah Kabupaten Pringsewu karena selama kurun waktu tahun 2010 sampai dengan tahun 2011 belum memperoleh wajar tanpa pengecualian (WTP) oleh BPK. Hal tersebut menunjukkan bahwa kualitas laporan keuangan pada pemerintah daerah Kabupaten Pringsewu belum memadai yang disebabkan karena lemahnya kompetensi sumber daya manusia, dan belum memadainya penerapan sistem akuntansi keuangan daerah. Selain itu belum menginternalisasi perencanaan implementasi SAP berbasis akrual dan terdapat regulasi dan kebijakan SAP berbasis akrual yang belum selaras dengan peraturan lainnya (ambar, 2014, www.teraslampung.com).

Beberapa penelitian berkenaan dengan pengaruh kompetensi sumber daya manusia dan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan antara lain; Ihsanti(2014) menyatakan bahwa kompetensi berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Sedangkan sistem akuntansi keuangan daerah tidak berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Penelitian Wati et.al (2014) menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah, penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah, sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah, dan kompetensi sumber daya manusia, penerapan standar akuntansi pemerintahan, sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Kemudian hasil penelitian Novalia (2015) menyatakan bahwa kompetensi SDM, penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, dan sistem pengendalian intern mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Selanjutnya hasil penelitian Anugerah (2016) menyatakan bahwa secara parsial dan simultan kompetensi sumber daya manusia dan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan Anugerah(2016) yang melakukan studi pada 17 SKPD Pemerintah Kota Bandung sebagai objek penelitian, sedangkan penulis melakukan studi empiris pada SKPD di Kabupaten Pringsewu.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Empiris pada SKPD di Kabupaten Pringsewu)”**

1.2.Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas. Maka permasalahan yang muncul pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaruhkompetensi sumber daya manusiaterhadap kualitas laporan keuangan pada SKPD di Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu?
2. Bagaimana pengaruhpenerapan sistem akuntansi keuangan daerahterhadap kualitas laporan keuangan pada SKPD di Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu?

1.3.Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian dilakukan agar penelitian dan pembahasanya lebih terarah, sehingga hasilnya tidak bias dan sesuai dengan harapan peneliti. Adapun ruang lingkup penelitiannya adalah menguji secara empiris pengaruh kompetensi sumber daya manusia danpenerapan sistem akuntansi keuangan daerahterhadap kualitas laporan keuangan pada SKPD di Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu.

1.4.Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan antara lain:

1. Membuktikan secara empiris pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pada SKPD di Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu.
2. Membuktikan secara empiris pengaruh sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pada SKPD di Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu.

1.5. Manfaat penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yaitu:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan Dapat memperluas wawasan dan pengetahuan serta bukti empiris mengenai kualitas laporan keuangan pada SKPD di Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu.
 - b. Penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi bagi peneliti yang akan melakukan penelitian lebih lanjut.
2. Manfaat Praktis / bagi pemerintah
Sebagai sumbangan pemikiran agar dapat digunakan atau diambil manfaatnya dan dijadikan bahan untuk pertimbangan dalam mengambil kebijakan terkait kualitas laporan keuangan.
3. Bagi Peneliti
Sebagai bahan pertimbangan antara teori-teori yang diperoleh di bangku kuliah dengan kenyataan yang sebenarnya terjadi di lapangan dan pengembangan mengenai akuntansi keprilakuan dan akuntansi sektor publik.

1.6. Sistematika Penulisan

Dalam hal ini sistematika penulisan diuraikan dalam 5 bab secara terpisah, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan tentang latar belakang masalah, Perumusan masalah, ruang lingkup penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Menguraikan tentang teori-teori yang mendukung penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti dan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi sumber data, metode pengumpulan data, seperti menjelaskan populasi dan sampel penelitian, fokus penelitian, variabel penelitian, teknik analisis data, metode analisis data, dan pengujian hipotesis.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini memdemonstrasikan pengetahuan akademis yang dimiliki dan ketajaman daya pikir peneliti dalam menganalisis persoalan yang dibahas, dengan berpedoman pada teori-teori yang dikemukakan pada Bab II.

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Menguraikan kesimpulan tentang rangkuman dari pembahasan, terdiri dari jawaban terhadap perumusan masalah dan tujuan penelitian serta hipotesis. Saran merupakan implikasi hasil penelitian terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan penggunaan praktis.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN